

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INFLASI

DI INDONESIA TAHUN 2018-2022

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INFLASI

DI INDONESIA TAHUN 2018-2022

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

TARISA RAMADHANI
19 0401 0230

Pembimbing Utama :

Muh. Ikram, S.Ak., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tarisa Ramadhani
NIM : 19 0401 0230
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Tarisa Ramadhani

19 0401 0230

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2018-2022 yang ditulis oleh Tarisa Ramadhani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0230, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 13 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ikram, S.Ak., M.Si. | Pembimbing | () |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2018-2022”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Serma Kadirman, S.Sos. dan Ibunda saya Irmawati, S.Pd., M.Pd. yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan saya mendukung setiap langkah positif dan selalu memberi nasehat sehingga hingga saat ini, semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kedua orang tua yang amat saya cintai. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E., M.E.I Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Muzayyanah Jabani, S.T M.M. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muh. Alwi, S.Sy., M.E.I begitupun juga dengan Sekretaris Program Studi, Ibu Hardianti Yusuf, S.E. Sy., M.E.
4. Bapak Muh. Alwi, S.Sy., M.E.I. dan Bapak Muh. Iksan Purnma, S.E.Sy., M.E.Sy selaku penguji I dan II yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya
5. Bapak Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. selaku pembimbing telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.

8. Untuk sahabat-sahabat Fahira Febrina Z, S.E, yang selalu menyemangati saya setiap masalah apapun itu sangat bersyukur mempunyai sahabat yang dapat menjadi rumah untuk berkeluh kesah dan mendukung dalam hal apapun, menemani dari masa SMA hingga saat ini segala sesuatu telah dilewati bersama walaupun terkadang keras kepala dan tidak pernah meninggalkan saya sebagai sahabatnya semoga kita dapat mewujudkan cita-cita bersama. Ramadhan sahabat yang telah membantu, mendukung penuh serta mendoakan setiap langkah dan usaha dalam penyelesaian skripsi saya, semoga Allah Swt membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada saya selaku sahabatnya.
9. Untuk Keilverliezer Siti Mutia Nurfadila, Andi Pinra, S.M, Andini Agsa, Astuti. K, S.Farm, Hida Guntur, Khinta Kumalasari, S. Farm, Ririn Wulandari, Chelsa terima kasih telah menemani saya jalan-jalan, nongkrong, serta berfoto-foto dengan membuat suasana yang ceria, dan heboh dan selalu ada hal-hal lucu di setiap pertemuan semoga selalu sehat dan dibukakan pintu jodoh serta dapat mencapai cita-cita bersama sampe hari tua.
10. Sahabat-sahabat saya Wardah Sakia, S.M, Fheby Febrianti, Nur Qalby, Mutmainnah yang telah menajdi sahabat saya dari kecil hingga sekarang. Tak henti-hentinya saya bersyukur dikelilingi sahabat yang positif dan selalu mendukung, membantu dan menyayangi saya selama ini, semoga segala kebaikannya diberi balasan dari Allah Swt dan segera mendapatkan jodoh dan rezeki yang lancar

Terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 22 September 2023


Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transi literasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى / ا ي	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ā</i> <i>ya'</i>		a dan garis di atas
ي ...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yan berakhir dengan ta marbutah diikitu oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransiterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
أَدْوًا : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

أَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)
عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiyy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta muruna*
النَّوْءُ : *al-nau*
شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi laIIACI bi bakkata mubarkan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIST.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori.....	11
1. Kebijakan Fisikal.....	12
2. Pajak	22
3. APBN	25
4. Inflasi.....	29
C. Kerangka Pikir	37
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan data	39
E. Teknik Analisis Data	39
F. Definisi Operasional Variabel	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Variabel.....	43
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.Al-Hasyr :717



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	37
----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kenaikan Tingkat Inflasi Dari Tahun 2018 - 2022	43
Tabel 4.2 Kenaikan Tingkat Pajak dari Tahun 2018-2022	48
Tabel 4.3 APBN dari tahun 2018-2022	54
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	59
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	60
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.8 Uji Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.9 Uji T	63
Tabel 4.10 Uji F	64
Tabel 4.11 Uji R ²	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Lampiran 2 Analisis Data

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Tarisa Ramadhani 2023, “*Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2018-2022*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo di bimbing oleh Muh. Ikram.

Skripsi ini membahas pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia tahun 2018-2022. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah pajak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, untuk membuktikan apakah APBN berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi semua data pengeluaran pemerintah di Indonesia sampel sebanyak data 34 provinsi selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 sebanyak 170 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui perolehan data laporan data belanja pemerintah dan inflasi Tahun 2018-2022. Data tersebut diperoleh dari badan atau lembaga yang resmi yakni Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak sebesar 2,130 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel pajak lebih besar dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau $2,130 > 1,974$ dan nilai $p-value$ atau $sig.$ variabel pajak sebesar 0,035 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Berdasarkan tabel uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,605 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,605 < 1,974$ dan nilai $p-value$ atau $sig.$ variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia. Berdasarkan tabel uji F tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,507 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 3,05 maka nilai F_{hitung} model tersebut lebih besar dari nilai F_{tabel} yang digunakan atau $2,507 < 3,05$ kemudian nilai $p-value$ atau $sig.$ sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05 ($0,085 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak dan APBN berpengaruh secara simultan terhadap inflasi di Indonesia.

Kata Kunci : APBN, Inflasi, Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan terjadi secara terus menerus. Inflasi merupakan sebuah fenomena yang selalu ada di setiap negara dan dijadikan sebagai indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidak stabilan perekonomian yang berakibat pada kenaikan tingkat kemiskinan.¹

Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang.² Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi.³

Keresahan akan inflasi ini sering menjadi beban bagi masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia, inflasi dianggap sebagai musuh rakyat dan sebagai

¹ Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). *Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh*. Inovasi, 16(2), 206–213.

² Sasono, H. (2020). *Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Indeks Harga Saham Gabungan dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-4. Hal. 1-9.

³ Septian, M. R. (2020). *Analisis faktor penentu inflasi di indonesia : pendekatan metode error correction mechanism*. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. 17(1), 121–128.

musuh ekonomi yang paling besar. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal serta ketidakjelasan biaya dan pendapatan di masa yang akan datang.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter.⁴

Berbagai teori dan kebijakan dikembangkan untuk mengatasi inflasi diantaranya terdapat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.⁵ Dalam tiga dekade terakhir, minat terhadap kebijakan ekonomi makro yang berdasarkan atas aturan (*rule-based policy*) ini makin mengalami peningkatan. Di area ekonomi moneter sejak diperkenalkan di Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Australia pada awal tahun 1990-an, penargetan inflasi (*inflation targeting*) telah diangkat dibanyak Negara. Sampai saat ini, tercatat 32 negara di seluruh dunia yang mengangkat penargetan inflasi dalam kerangka kerja kebijakan moneter. Sejalan dengan kecenderungan di atas, di bidang ekonomi publik, aturan *fiskal* (*fiscal rule*) mendapat popularitas yang cukup besar diberbagai belahan dunia. Awalnya,

⁴ Arifah, L. F. (2020). *Dunia Dan Variabel Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 1996-2018*. *Jurnal9 Ilmu Ekonomi*, 10(1), 23–44.

⁵ Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>

didorong oleh defisit anggaran yang tinggi di tahun 1970-an, sebanyak 87 negara saat ini telah memberlakukan aturan fiskal.⁶

Posisi fiskal yang tidak berkelanjutan memiliki dampak negatif pada tingkat bunga pasar sehingga dampak berikutnya adalah kenaikan ekspektasi inflasi dan pada akhirnya berpengaruh kepada tingkat inflasi itu sendiri. Cara membiayai defisit anggaran yang tinggi salah satunya dengan melakukan pencetakan uang (*printing money*), namun pencetakan uang (*printing money*), pada tingkat yang melebihi permintaan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar ditangan masyarakat, dan hal ini dapat juga menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga pencetakan uang (*printing money*) tidak diperbolehkan dalam membiayai defisit anggaran. Dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskal akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biaya pinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut, efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara merespon akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya⁷

Dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskal akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biaya pinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut, efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara merespon akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya.

⁶ Nuru, N. Y., & Gereziher, H. Y. (2021). *The effect of fiscal policy on economic growth in South Africa: a nonlinear ARDL model analysis*. Journal of Economic and Administrative Sciences, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/jeas-06-2020-0088>

⁷ Assa, R., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2020). *Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode : 2006.1 – 2019-2*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(01), 23–33.

Menurut penelitian dari Ndari Surjaningsih G. A. Diah Utari Budi Trisnanto "*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi*"(2019).⁸ Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ndari Surianingsih G.A. Diah Utari Budi Trisnanto yaitu Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang.

Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa shock kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara *shock* kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setiap organisasi atau lembaga tersebut untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Renstra organisasi atau kelembagaan tersebut. Renstra inilah

⁸ Surjaningsih, Ndari; Utari, G. A. Diah; and Trisnanto, Budi "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 14: No. 4, Article 7.

yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang nantinya akan dicapai.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “*Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2018-2022*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pajak Berpengaruh Terhadap Inflasi di Indonesia?
2. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berpengaruh Terhadap Inflasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan apakah pajak berpengaruh terhadap inflasi di Kota Indonesia
2. Untuk membuktikan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpengaruh terhadap inflasi di Kota Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

⁹ Abdul Kadir Arno, Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, September 2016

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai inflasi yang terjadi di Indonesia serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia.

b. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan fiskal bila terjadi inflasi disuatu daerah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi masyarakat bila terjadi inflasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memiliki beberapa landasan empiris dari penelitian terdahulu guna menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian serupa dan sejenis yang pernah dilakukan oleh para akademisi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menemukan letak perbedaan penelitian yang pernah ada. Berikut Matriks penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian :

1. Nella Damayanti Hutauruk dengan Judul Penelitian "*Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia*".(2019). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari kredibilitas kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dalam kuartal dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan yang mencakup periode 2001(1) sampai 2013(4). Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda sederhana dengan menggunakan aplikasi *eviews 8*, data menunjukkan bahwa. Adapun hasil penelitiannya yakni : data menunjukkan bahwa hasil kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit tidak signifikan sebesar 0.73 dengan koefisien negatif sebesar -0.24 dan menunjukkan bahwa kredibilitas dalam aturan defisit masih kurang kredibel dalam keadaan inflasi. Sementara untuk kredibilitas aturan utang signifikan sebesar 0.003 dengan koefisien negatif

sebesar -0.31 dan menunjukkan bahwa kredibilitas aturan utang memiliki kredibilitas yang baik serta mampu menurunkan inflasi. Kemudian untuk hasil diskresioner tidak signifikan sebesar 0.59 dengan koefisien negatif sebesar -0.004 dan menjelaskan inflasi. Kemudian untuk variabel openness yang dilihat dari sektor riil yaitu ekspor dan impor signifikan sebesar 0.01 dengan koefisien positif sebesar 0.07 dan dapat berdampak pada inflasi. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal yang kredibel terhadap inflasi terbukti secara statistik lebih cepat mencapai keseimbangan daripada kebijakan fiskal yang tidak kredibel.¹⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama mengukur terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan data inflasi di Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan data inflasi 34 provinsi di Indonesia. Kemudian tujuan yang ingin dicapai juga berbeda, pada penelitian sebelumnya tujuannya untuk mengukur kredibilitas sedangkan pada penelitian ini tujuannya untuk mengukur pengaruh dengan teknik analisis yang berbeda

2. Berto Muharman dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia.*” (2020). Dalam penelitiannya menggunakan metode analisis dinamis *error correction mechanism* (ECM). Metode penelitian Dalam penelitian ini

¹⁰ Nella Damayanti Hutauruk “*Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia*”. Skripsi Program Strata I Universitas Negeri Jakarta tahun 2019.

menggunakan analisis pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu perekonomian Indonesia tahun 1970 sampai dengan 2012 dengan pendekatan dinamis *Error Correction Mechanism* (ECM). Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja negara dan pajak terhadap PDB dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga untuk mengetahui pengaruh belanja negara dan pajak terhadap inflasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak memiliki hubungan jangka pendek yang positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Besarnya pengaruh jangka pendek pengeluaran pemerintah hampir sama dengan penerimaan pajak dalam mengestimasi kenaikan laju inflasi, hal ini dilihat dari nilai masing-masing koefisien pengeluaran negara dan pajak sebesar 1,608 dan 1,598. Hasil ini sesuai dengan teori demand pull inflation dimana jika terdapat kelebihan dari sisi permintaan sehingga menyebabkan kenaikan harga.¹¹

Dari hasil penelitian terdahulu di atas peneliti dapat memberikan gambaran bahwa perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama meneliti tentang inflasi dan kebijakan fiskal. Sedangkan perbedaannya dilihat dari kebijakan fiskal yang di ambil dalam mengukur inflasi.

¹¹ Berto Muharman “*Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi Di Indonesia.*” Universitas Brawijaya Vo. 1 No 2 Tahun 2020

3. Ndari Surjaningsih G. A. Diah Utari Budi Trisnanto “*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi*”(2019).¹² Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ndari Surjaningsih G.A. Diah Utari Budi Trisnanto yaitu Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa shock kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara shock kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

¹² Surjaningsih, Ndari; Utari, G. A. Diah; and Trisnanto, Budi "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 14: No. 4, Article 7.

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Fisikal

a. Definisi Kebijakan Fiskal Konvensional

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.”¹³ Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah”.¹⁴ Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.¹⁵

¹³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hal. 1

¹⁴ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

¹⁵ Noripin, *Ekonomi Moneter, Buku II* (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet.

Menurut Rozalinda, “Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.”¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

- 1) Belanja/pengeluaran negara ($G = \textit{government expenditure}$)
- 2) Perpajakan ($T = \textit{taxes}$)

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

- 1) Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
- 2) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi
- 3) Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan, keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaan, sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tentulah tindakan ini sangat tidak bijak.

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015), Ed. 1, Cet. 2, hal. 137

Zaman sekarang pemerintah dikebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

b. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi -seorang pemikir terkemuka abad ke-5- berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi tereralisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa.¹⁷

Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif

¹⁷ Sabahuddin mengutipnya dari *Haney Lewis H, History of Economic Thought* hal 85. Lihat: Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, h. 32

masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'.

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur'an. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau

jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu daerah tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Anggaran belanja pada masa pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Pendapatan negara yang masih baru ini beredar dari tahun ke tahun. Di masa awal pemerintahan Islam, dasar anggarannya adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Bisa dikatakan, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan riba yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem

ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitulmaal (*national treasury*). Dari berbagai macam instrument, pajak diterapkan atas individu (*jizya* dan pajak khusus muslim), tanah *Kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizya* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.

Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya QS-Al Hasyr: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya :“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya amat keras hukumannya.”

Juga dalam hadist Nabi SAW:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَجِّرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

“ jika pada suatu pagi di suatu kampong terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka. “Dalam kesempatan lain” Tidak beriman kepada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadist Qudsi).¹⁸

c. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi

¹⁸ Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hal.154-156

masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada tujuan yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Jika harga-harga umum yang terus-menerus meningkatkan pada suatu saat dan tingkat tertentu hanya akan menguntungkan para pelaku bisnis. Jadi, bila harga-harga umum terus menunjukkan kenaikan yang tajam (menimbulkan inflasi) hanya akan menguntungkan segelintir pelaku bisnis dan akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi orang yang berpenghasilan tetap. Keadaan inflasi yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi boomerang pada dunia usaha karena investasi produktif akan semakin berkurang. Berkurangnya investasi produktif ini terjadi sebagai akibat beralihnya investasi terhadap barang-barang yang tahan inflasi (*against inflation goods*) seperti tanah, dan bangunan, dan logam mulia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal membawa pengaruh bagi perekonomian. Adapun pengaruh-pengaruhnya, antara lain:

- 1) Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
- 2) Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ($AD = C + G + I + X - M$) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerpakan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masrakat.

d. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal.

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

- 1) Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
 - b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
 - c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang
- 2) Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

- 3) Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*)

Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.¹⁹ Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4) Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri

e. Indikator Kebijakan Fiskal

¹⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, hal.9

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (khususnya permintaan swasta). “Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak).”²⁰

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.²² Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-

²⁰ Noripin, *Ekonomi Moneter, Buku II* (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet. 1

²¹ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), hal. 1

²² Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet.ke-1 hal. 978

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²³

Secara umum dapat dikatakan pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Pengertian Pajak Pribadi

Sesungguhnya dasar pajak adalah ukuran individu dan harta. Ukuran pajak pribadi adalah individu atau personal, sedangkan ukuran pajak harta adalah harta itu sendiri yang termasuk pajak pribadi adalah penghasilan seseorang yang tidak dilihat dari segi ekonomisnya. Pajak diambil dari masyarakat dalam bentuk yang luas dan sama di antara masyarakat mukallaf dengan menyerahkan ketentuan pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean.²⁴

²³ Waluyo, *Perpajakan*, (Jakarta, Salemba Empat : 2011) hal, 02

²⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogya, PT Tiara Wacana Yogya: 2003) hal. 64

Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Pajak pribadi dalam hal ini pengenaan pajak lebih memerhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi).
- 2) Pajak kebendaan yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).
- 3) Pajak atas kekayaan yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan hukum (PPK)
- 4) Pajak atas bertambahnya kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertumbuhan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali.
- 5) Pajak atas pemakaian (konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI).
- 6) Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati para produsen.

1) Fungsi Pajak

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu :²⁶

c. Fungsi *Budgetair*/Penerimaan

Fungsi *budgetair* (penerimaan) ini merupakan fungsi utama pajak, atau atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan

²⁵ Nuruddin Mhdd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 39

²⁶ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana : 2006) hal, 25-28

sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya, diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

d. Fungsi *Regulerend*/Regulasi

Fungsi *regulerend*/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*. oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Sementara Abdul Halim menyatakan APBD adalah Suatu rencana pekerjaan keuangan (*Financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.²⁷

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.²⁸

Definisi APBD pada orde lama adalah kegiatan badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang

²⁷ Abdul Halim, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali* (Jakarta, 2004), 15

²⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, 21

menjad dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi.

b. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

- a) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan bermakna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah
- e) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f) Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

b. Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.²⁹
- 2) Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

²⁹ Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (2005, hal. 107)

kemasyarakatan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.³⁰ Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- 3) Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.

³⁰ Sony Yuwono dkk, *Penganggaran Sektor Publik* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), 108

4. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Menurut Noripin, yang dimaksud “Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus”.³¹ Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Menurut Rozalinda, “Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus.”³² Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya, harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya, karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi.

Secara umum, inflasi rendah masih dapat diterima, bahkan dalam tingkat tertentu bisa mendorong perkembangan ekonomi. Keadaan tersebut mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka (sesuai hukum penawaran, apabila harga barang/jasa naik maka produsen akan menambah jumlah barang/jasa yang ditawarkan). Dengan harga yang semakin tinggi,

³¹ Noripin, *Ekonomi Moneter, Buku II* (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet.1

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015), Ed. 1, Cet. 2, hal. 137

menjadikan pendapatan produsen meningkat. Selain itu, peningkatan biaya produksi tidak secepat kenaikan harga. Dengan demikian, kenaikan harga produk berarti juga mendorong peningkatan laba produsen. Di sisi lain, inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat turun, tetapi tidak signifikan. Mungkin sebagian penduduk tidak merasakan kenaikan harga. Akibatnya mereka tidak mengurangi belanja/konsumsinya.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi karena dari sisi permintaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Idealnya inflasi dihitung berdasarkan kenaikan semua harga barang dan jasa. Tetapi karena masalah kepraktisan, penghitungan inflasi didasarkan atas sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan 744 komoditas yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi 7 kategori, sebagai berikut : 1) Bahan makanan, 2) Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, 3) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, 4) Sandang, 5) Kesehatan, 6) Pendidikan, rekreasi, dan olah raga, 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). "IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli masyarakat dalam satu periode tertentu."³³ IHK diperoleh

³³ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK-1})}{\text{IHK-1}} \times 100\%$$

b. Jenis-jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat dibedakan antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibedakan ke dalam tiga kategori antara lain sebagai berikut:

1) Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Creeping inflation biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka relatif lama.

2) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (10%-30%) dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

3) Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (30%-100%), harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk

menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

c. Jenis-jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi. “Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar,” Antara lain:

1) *Demand-pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga juga menaikkan hasil produksi (*output*).

2) *Cost-push Inflation*

Berbeda dengan *demand pull inflation*, *cost push inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

3) *Natural Inflation*

Inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa mencegahnya.” Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Ketika bencana alam terjadi berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan perbendaharaan menjadi berkurang secara drastis atau defisit anggaran.

4) *Human Error Inflation*

Yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia.

d. Asal Inflasi

1) *Domestic Inflation*

Domestic inflation yakni Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul karena defisit negara, gagal panen, atau permintaan meningkat untuk barang tertentu.³⁴

2) *Foreign atau Imported Inflation*

Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi yang timbul karena kenaikan harga barang-barang yang kita impor atau karena lonjakan permintaan ekspor secara terus menerus yang berasal dari luar negeri.

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 306.

e. Implikasi Inflasi

1) Terhadap Pendapatan

Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi inflasi dapat mendorong perekonomian. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambah pendapatan seseorang. Namun bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang mengalami penurunan juga. Kerugian ini dikarenakan penghasilan tetap tersebut akan ditukarkan dengan barang dan jasa yang semakin mahal sedangkan pendapatan mereka tetap.³⁵ Akan tetapi bagi seseorang yang presentase pendapatannya melebihi presentase kenaikan inflasi atau pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.

Jika inflasi 20% pertahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% maka inflasi dapat dihindari karena dampak buruk inflasi ini dapat dihindari jika pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

³⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predia Media Group, 2009), 190.

2) Terhadap Ekspor

Pada keadaan ini daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor makin mahal. Meski dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang dan tentu devisa yang diperoleh pun semakin kecil.

3) Terhadap Minat Menabung

Terhadap Minat Menabung Pendapatan riil para penabung berkurang sehingga para penabung enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.

4) Terhadap Sektor Riil

Inflasi akan mengakibatkan hambatan dan gangguan proses pertumbuhan di sektor riil. Hal ini dikarenakan dengan terjadinya inflasi maka tingkat pembelian masyarakat (permintaan agregat) akan mengalami penurunan dan selanjutnya penurunan ini akan menyebabkan pihak produsen harus mengurangi tingkat produksi (output) yang berujung pada pemutusan kerja dan bertambahnya pengangguran. Selain itu ketika inflasi otomatis suku bunga juga naik. Kenaikan suku bunga ini akan menyulitkan sektor riil atas peningkatan produksi atau pengembangan usahanya karena tingginya biaya modal.

5) Distorsi Harga

Pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual menyadari inflasi tersebut dan bisa membedakan inflasi antar barang yang bersubsstitusi (barang pengganti). Jadi bila harga daging lebih tinggi, orang akan beralih ketelur. Namun pada inflasi yang tinggi, orang tidak memahami perbedaan laju inflasi karena harga semua barang naik tinggi.³⁶

6) Distorsi Penggunaan Uang

Setiap orang mengubah cara menggunakan uang karena inflasi berarti menurunkan nilai uang, orang cenderung memaksimalkan penggunaan uang atas jumlah uang yang ada.

7) Distorsi Pajak

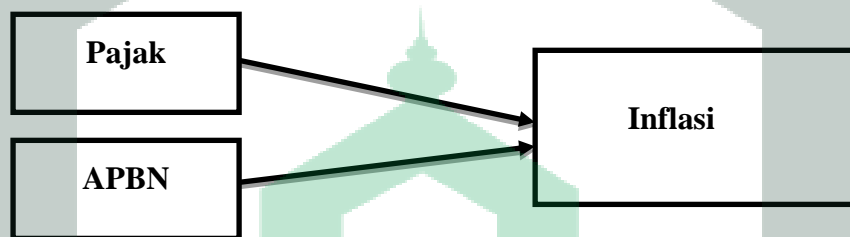
Semakin tinggi inflasi semakin tinggi beban pajak secara riil.

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 308

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan tinjauan pustaka. Dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait atau relevan.

Adapun kerangka pikir yang akan diterapkan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H1 : Apakah Pajak berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.
- H2 : Apakah APBN berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.
- H3 : Apakah Pajak dan APBN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah metode yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka- angka yang kemudian dijelaskan dan di interpresetasikan dalam suatu uraian. Penelitian ini merupakan penelitian analisis pengaruh, karena tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara dua variabel.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua data belanja pemerintah dan inflasi Indonesia. Dari populasi tersebut diambil sampel untuk memudahkan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yaitu data belanja pemerintah dan inflasi di 34 provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022 sebanyak 170 sampel.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, dimulai pada Juni hingga Agustus 2023. Lokasi penelitian ini di Badan Pusat Statistik dengan menggunakan data sekunder yakni laporan tahunan 2018-2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data arsip atau dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui perolehan data laporan data belanja pemerintah dan inflasi Tahun 2018-2022. Data tersebut diperoleh dari badan atau lembaga yang resmi yakni Pusat Statistik (BPS).

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat maka penulis menggunakan Regresi Linear Sederhana yaitu teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Sebelum melakukan analisis regresi, untuk mendapatkan nilai yang baik maka penulis melakukan pengujian instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas :

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Untuk mengetahui

apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan memperhatikan angka pada Asymp. Sig.(2-tailed) dengan ketentuan :

Data terdistribusi normal apabila nilai sig $> 0,05$.

Data berdistribusi tidak normal apabila nilai sig $< 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berarti variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam satu model regresi saling berkorelasi linear. Biasanya korelasinya mendekati sempurna atau sempurna. Pendeteksian terhadap multikolinieritas dalam model regresi berganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Jika nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson(dl dan dU).

d. Uji Heterokedastisitas

Diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolute residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolute residual ($\alpha = 0,05$) maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedasitas.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh Inflasi dalam hal ini Pajak dan APBN Terhadap Inflasi di Indonesia sehingga persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan

Y = Inflasi

X1 = Pajak

X2 = APBN

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana Uji Secara Simultan (Uji F), Uji Secara Parsial (Uji T). Untuk menguji hipotesis penelitian, maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product And Service Solution*).

F. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel. Spesifikasi tersebut menunjukkan pada dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diperoleh melalui

pengamatan dan penelitian terdahulu. Berikut ini penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yakni inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi Indonesia Tahun 2018-2022 diperoleh dari badan atau lembaga yang resmi yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Pusat Statistik (BPS)

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini yakni kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Instrumen kebijakan fiskal sangat beragam, tetapi yang pasti berhubungan dengan keuangan negara seperti perpajakan, dll.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mencerminkan harga-harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah ekonomi. Besarnya tingkat inflasi kemungkinan akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank, dengan inflasi yang lebih tinggi mengakibatkan profitabilitas yang lebih rendah. Berikut di bawah ini menggambarkan kenaikan tingkat inflasi dari tahun 2018 ke tahun 2022

Tabel 4.1 Kenaikan Tingkat Inflasi dari Tahun 2018 - 2022.

No	Provinsi	Tahun	Inflasi (%)
1	Aceh	2018	1,84
		2019	1,69
		2020	1,69
		2021	3,59
		2022	5,32
2	Sumatera Utara	2018	1,23
		2019	2,33
		2020	1,96
		2021	1,71
		2022	6,12
3	Sumatera Barat	2018	3,5 1
		2019	1,67
		2020	2,11
		2021	1,40
		2022	7,43
4	Sumatera Selatan	2018	3,80
		2019	3,70

		2020	2,42
		2021	1,54
		2022	6,81
5	Riau	2018	3,30
		2019	3,20
		2020	2,90
		2021	2,40
		2022	2,10
6	Jambi	2018	3,10
		2019	3,00
		2020	2,70
		2021	2,20
		2022	1,90
7	Bengkulu	2018	3,40
		2019	3,30
		2020	2,90
		2021	2,30
		2022	2,00
8	Lampung	2018	3,20
		2019	3,10
		2020	2,80
		2021	2,50
		2022	2,20
9	Bangka Belitung	2018	3,60
		2019	3,50
		2020	3,20
		2021	2,70
		2022	2,40
10	Kepulauan Riau	2018	3,70
		2019	3,60
		2020	3,30
		2021	2,80
		2022	2,50
11	DKI Jakarta	2018	3,50
		2019	3,40
		2020	3,10
		2021	2,60
		2022	2,30
12	Jawa Barat	2018	3,40
		2019	3,30
		2020	3,00

		2021	2,50
		2022	2,20
13	Jawa Tengah	2018	3,30
		2019	3,20
		2020	2,90
		2021	2,40
		2022	2,10
14	DI Yogyakarta	2018	3,20
		2019	3,10
		2020	2,80
		2021	2,30
		2022	2,00
15	Jawa Timur	2018	3,20
		2019	3,10
		2020	2,80
		2021	2,30
		2022	2,00
16	Banten	2018	3,50
		2019	3,40
		2020	3,00
		2021	2,60
		2022	2,30
17	Bali	2018	3,60
		2019	3,50
		2020	3,10
		2021	2,70
		2022	2,40
18	Nusa Tenggara Barat	2018	3,70
		2019	3,60
		2020	3,20
		2021	2,80
		2022	2,50
19	Nusa Tenggara Timur	2018	3,80
		2019	3,70
		2020	3,30
		2021	2,90
		2022	2,60
20	Kalimantan Barat	2018	3,40
		2019	3,30
		2020	3,00
		2021	2,50

		2022	2,20
21	Kalimantan Tengah	2018	2,50
		2019	3,00
		2020	2,20
		2021	2,80
		2022	2,00
22	Kalimantan Selatan	2018	3,00
		2019	3,20
		2020	2,50
		2021	2,70
		2022	2,10
23	Kalimantan Timur	2018	2,80
		2019	3,10
		2020	2,30
		2021	2,90
		2022	2,20
24	Kalimantan Utara	2018	2,30
		2019	2,50
		2020	2,00
		2021	2,40
		2022	1,80
25	Sulawesi Utara	2018	2,40
		2019	2,60
		2020	2,10
		2021	2,50
		2022	1,90
26	Sulawesi Tengah	2018	2,30
		2019	2,50
		2020	2,00
		2021	2,40
		2022	1,80
27	Sulawesi Selatan	2018	3,50
		2019	2,72
		2020	2,35
		2021	2,40
		2022	6,00
28	Sulawesi Tenggara	2018	2,50
		2019	2,70
		2020	2,10
		2021	2,60
		2022	2,00

29	Gorontalo	2018	2,20
		2019	2,40
		2020	1,80
		2021	2,30
		2022	1,70
30	Sulawesi Barat	2018	2,20
		2019	2,30
		2020	1,70
		2021	2,10
		2022	1,50
31	Maluku	2018	2,70
		2019	2,90
		2020	2,30
		2021	2,80
		2022	2,20
32	Maluku Utara	2018	2,60
		2019	2,80
		2020	2,20
		2021	2,70
		2022	2,10
33	Papua Barat	2018	3,00
		2019	3,20
		2020	2,50
		2021	2,90
		2022	2,30
34	Papua	2018	3,20
		2019	3,40
		2020	1,64
		2021	3,10
		2022	5,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 4.1 menggambarkan tingkat inflasi di berbagai provinsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Misalnya, Provinsi Aceh mengalami tingkat inflasi yang relatif rendah pada tahun 2018 (1,84%), namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 (5,32%). Sementara itu, Sumatera Utara mengalami

fluktuasi inflasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan tingkat tertinggi mencapai 6,12% pada tahun 2022. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat inflasi di setiap provinsi mungkin beragam, termasuk kebijakan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan dalam permintaan dan penawaran. Ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan manajemen inflasi yang cermat di tingkat daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya kepada pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mendukung berbagai proyek dan kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah. Berikut di bawah ini menggambarkan kenaikan tingkat Pajak dari tahun 2018 ke tahun 2022.

Tabel 4.2 Kenaikan Tingkat Pajak dari Tahun 2018-2022

No	Provinsi	Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)
1	Aceh	2018	Rp 6.325,50
		2019	Rp 6.582,40
		2020	Rp 6.845,70
		2021	Rp 7.120,35
		2022	Rp 7.409,55
2	Sumatera Utara	2018	Rp 5.212,75
		2019	Rp 5.434,20
		2020	Rp 5.667,30
		2021	Rp 5.912,80

		2022	Rp	6.171,10
3	Sumatera Barat	2018	Rp	5.212,75
		2019	Rp	5.434,20
		2020	Rp	5.667,30
		2021	Rp	5.912,80
		2022	Rp	6.171,10
4	Sumatera Selatan	2018	Rp	8.930,25
		2019	Rp	9.273,75
		2020	Rp	9.634,90
		2021	Rp	10.014,80
		2022	Rp	10.414,85
5	Riau	2018	Rp	3.245,60
		2019	Rp	3.378,80
		2020	Rp	3.516,75
		2021	Rp	3.659,65
		2022	Rp	3.807,60
6	Jambi	2018	Rp	4.876,20
		2019	Rp	5.079,40
		2020	Rp	5.292,50
		2021	Rp	5.516,40
		2022	Rp	5.751,40
7	Bengkulu	2018	Rp	2.118,75
		2019	Rp	2.208,00
		2020	Rp	2.300,80
		2021	Rp	2.396,40
		2022	Rp	2.494,90
8	Lampung	2018	Rp	4.562,90
		2019	Rp	4.750,20
		2020	Rp	4.949,70
		2021	Rp	5.161,60
		2022	Rp	5.386,80
9	Bangka Belitung	2018	Rp	1.972,30
		2019	Rp	2.052,40
		2020	Rp	2.135,30
		2021	Rp	2.221,10
		2022	Rp	2.309,00
10	Kepulauan Riau	2018	Rp	2.348,10
		2019	Rp	2.444,40
		2020	Rp	2.543,40
		2021	Rp	2.645,20
		2022	Rp	2.749,90

11	DKI Jakarta	2018	Rp	5.680,75
		2019	Rp	5.698,60
		2020	Rp	5.838,70
		2021	Rp	5.107,40
		2022	Rp	5.510,20
12	Jawa Barat	2018	Rp	3.216,80
		2019	Rp	3.426,40
		2020	Rp	3.689,10
		2021	Rp	3.007,40
		2022	Rp	3.384,60
13	Jawa Tengah	2018	Rp	2.875,20
		2019	Rp	2.590,80
		2020	Rp	2.356,10
		2021	Rp	2.174,90
		2022	Rp	2.050,90
14	DI Yogyakarta	2018	Rp	8.760,90
		2019	Rp	9.115,20
		2020	Rp	9.482,80
		2021	Rp	9.864,50
		2022	Rp	9.261,80
15	Jawa Timur	2018	Rp	3.459,50
		2019	Rp	3.667,20
		2020	Rp	3.010,50
		2021	Rp	3.394,80
		2022	Rp	3.827,40
16	Banten	2018	Rp	2.654,70
		2019	Rp	3.171,40
		2020	Rp	3.711,90
		2021	Rp	4.278,80
		2022	Rp	4.873,60
17	Bali	2018	Rp	5.861,30
		2019	Rp	6.101,20
		2020	Rp	6.356,80
		2021	Rp	6.629,20
		2022	Rp	6.919,10
18	Nusa Tenggara Barat	2018	Rp	2.735,20
		2019	Rp	2.845,70
		2020	Rp	2.964,40
		2021	Rp	3.091,20
		2022	Rp	3.226,10
19	Nusa Tenggara	2018	Rp	2.150,50

	Timur	2019	Rp	2.235,60
		2020	Rp	2.324,70
		2021	Rp	2.418,00
		2022	Rp	2.515,50
20	Kalimantan Barat	2018	Rp	5.320,90
		2019	Rp	5.541,80
		2020	Rp	5.776,60
		2021	Rp	6.026,40
		2022	Rp	6.291,40
21	Kalimantan Tengah	2018	Rp	3.905,60
		2019	Rp	4.064,80
		2020	Rp	4.233,40
		2021	Rp	4.413,70
		2022	Rp	4.606,10
22	Kalimantan Selatan	2018	Rp	5.891,40
		2019	Rp	6.131,80
		2020	Rp	6.388,90
		2021	Rp	6.663,90
		2022	Rp	6.957,10
23	Kalimantan Timur	2018	Rp	7.239,20
		2019	Rp	7.538,40
		2020	Rp	7.854,10
		2021	Rp	8.187,70
		2022	Rp	8.540,60
24	Kalimantan Utara	2018	Rp	2.763,80
		2019	Rp	2.837,40
		2020	Rp	2.913,30
		2021	Rp	2.991,70
		2022	Rp	2.072,60
25	Sulawesi Utara	2018	Rp	2.894,10
		2019	Rp	3.010,50
		2020	Rp	3.134,90
		2021	Rp	3.267,50
		2022	Rp	3.408,70
26	Sulawesi Tengah	2018	Rp	2.238,60
		2019	Rp	2.333,80
		2020	Rp	2.433,60
		2021	Rp	2.538,20
		2022	Rp	2.647,60
27	Sulawesi Selatan	2018	Rp	6.057,80
		2019	Rp	6.306,90

		2020	Rp	6.575,40
		2021	Rp	6.863,70
		2022	Rp	7.172,40
28	Sulawesi Tenggara	2018	Rp	3.695,10
		2019	Rp	3.764,20
		2020	Rp	3.836,30
		2021	Rp	3.911,50
		2022	Rp	3.989,90
29	Gorontalo	2018	Rp	3.952,75
		2019	Rp	3.991,10
		2020	Rp	3.032,40
		2021	Rp	3.076,70
		2022	Rp	3.124,10
30	Sulawesi Barat	2018	Rp	2.225,30
		2019	Rp	2.273,80
		2020	Rp	3.325,20
		2021	Rp	3.379,70
		2022	Rp	3.437,40
31	Maluku	2018	Rp	3.254,60
		2019	Rp	3.306,20
		2020	Rp	3.361,80
		2021	Rp	3.419,70
		2022	Rp	3.482,00
32	Maluku Utara	2018	Rp	2.771,50
		2019	Rp	3.803,20
		2020	Rp	3.836,30
		2021	Rp	3.870,80
		2022	Rp	3.906,80
33	Papua Barat	2018	Rp	2.856,90
		2019	Rp	2.934,80
		2020	Rp	2.015,30
		2021	Rp	2.098,40
		2022	Rp	2.184,20
34	Papua	2018	Rp	2.987,20
		2019	Rp	3.110,50
		2020	Rp	3.237,20
		2021	Rp	3.367,50
		2022	Rp	3.501,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Pendapatan dari pajak daerah di berbagai Provinsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yang positif. Sebagai contoh, Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah dari Rp 6.325,50 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 7.409,55 juta pada tahun 2022. Hal serupa terjadi di banyak provinsi lainnya seperti Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur, yang mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan pajak daerah ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional dan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah singkatan dari "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." Ini adalah sebuah rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup semua sumber pendapatan negara, seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan dana lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Berikut di bawah ini menggambarkan kenaikan tingkat APBN dari tahun 2018 ke tahun 2022.

Tabel 4.3 APBN dari tahun 2018-2022.

No	Provinsi	Tahun	Total APBD (Juta Rupiah)
1	Aceh	2018	Rp 16.000.670,71
		2019	Rp 17.288.018,00
		2020	Rp 18.709.340,00
		2021	Rp 17.288.018,00
		2022	Rp 16.752.054,00
2	Sumatera Utara	2018	Rp 27.000.089,11
		2019	Rp 13.252.957,00
		2020	Rp 14.060.766,00
		2021	Rp 13.252.957,00
		2022	Rp 13.956.499,00
3	Sumatera Barat	2018	Rp 13.000.645,42
		2019	Rp 6.701.552,00
		2020	Rp 6.954.112,00
		2021	Rp 6.701.552,00
		2022	Rp 6.800.124,00
4	Sumatera Selatan	2018	Rp 8.707.050,65
		2019	Rp 8.704.391,00
		2020	Rp 8.771.607,00
		2021	Rp 8.704.391,00
		2022	Rp 9.132.749,00
5	Riau	2018	Rp 4.219.739,07
		2019	Rp 4.820.948,00
		2020	Rp 5.244.690,00
		2021	Rp 4.820.948,00
		2022	Rp 4.534.149,00
6	Jambi	2018	Rp 8.008.364,60
		2019	Rp 9.753.498,00
		2020	Rp 9.953.601,00
		2021	Rp 9.753.498,00
		2022	Rp 10.831.506,00
7	Bengkulu	2018	Rp 1.244.005,79
		2019	Rp 2.816.001,00
		2020	Rp 3.147.376,00
		2021	Rp 2.816.001,00
		2022	Rp 3.067.274,00
8	Lampung	2018	Rp 3.500.266,01
		2019	Rp 7.355.451,00

		2020	Rp	7.481.835,00
		2021	Rp	7.355.451,00
		2022	Rp	7.652.495,00
9	Bangka Belitung	2018	Rp	5.300.233,23
		2019	Rp	2.624.707,00
		2020	Rp	2.996.476,00
		2021	Rp	2.624.707,00
		2022	Rp	3.108.627,00
10	Kepulauan Riau	2018	Rp	3.692.199,68
		2019	Rp	3.919.807,00
		2020	Rp	4.046.212,00
		2021	Rp	3.919.807,00
		2022	Rp	3.986.943,00
11	DKI Jakarta	2018	Rp	32.117.342,46
		2019	Rp	61.469.821,00
		2020	Rp	74.077.191,00
		2021	Rp	61.469.821,00
		2022	Rp	84.196.594,00
12	Jawa Barat	2018	Rp	7.396.543,00
		2019	Rp	39.376.316,00
		2020	Rp	39.199.187,00
		2021	Rp	39.376.316,00
		2022	Rp	44.715.066,00
13	Jawa Tengah	2018	Rp	52.232.462,47
		2019	Rp	26.513.084,00
		2020	Rp	27.490.557,00
		2021	Rp	26.513.084,00
		2022	Rp	27.383.751,00
14	DI Yogyakarta	2018	Rp	5.158.001,14
		2019	Rp	6.035.224,00
		2020	Rp	6.173.815,00
		2021	Rp	6.035.224,00
		2022	Rp	6.214.072,00
15	Jawa Timur	2018	Rp	32.310.579,52
		2019	Rp	36.022.542,00
		2020	Rp	38.411.057,00
		2021	Rp	36.022.542,00
		2022	Rp	33.044.298,00
16	Banten	2018	Rp	12.212.145,55
		2019	Rp	12.122.344,00
		2020	Rp	12.281.829,00

		2021	Rp	12.122.344,00
		2022	Rp	16.013.254,00
17	Bali	2018	Rp	6.322.420,56
		2019	Rp	6.550.978,00
		2020	Rp	7.350.130,00
		2021	Rp	6.550.978,00
		2022	Rp	8.582.890,00
18	Nusa Tenggara Barat	2018	Rp	4.270.669,30
		2019	Rp	5.368.329,00
		2020	Rp	5.293.087,00
		2021	Rp	5.368.329,00
		2022	Rp	5.538.932,00
19	Nusa Tenggara Timur	2018	Rp	5.033.119,77
		2019	Rp	5.850.641,00
		2020	Rp	5.570.444,00
		2021	Rp	5.850.641,00
		2022	Rp	7.994.706,00
20	Kalimantan Barat	2018	Rp	5.211.744,24
		2019	Rp	6.242.375,00
		2020	Rp	6.304.659,00
		2021	Rp	6.242.375,00
		2022	Rp	7.090.493,00
21	Kalimantan Tengah	2018	Rp	4.032.500,60
		2019	Rp	5.377.960,00
		2020	Rp	5.680.470,00
		2021	Rp	5.377.960,00
		2022	Rp	5.020.296,00
22	Kalimantan Selatan	2018	Rp	2.122.315,53
		2019	Rp	6.879.065,00
		2020	Rp	7.397.118,00
		2021	Rp	6.879.065,00
		2022	Rp	5.526.165,00
23	Kalimantan Timur	2018	Rp	12.222.421,62
		2019	Rp	12.382.489,00
		2020	Rp	13.637.013,00
		2021	Rp	12.382.489,00
		2022	Rp	11.616.186,00
24	Kalimantan Utara	2018	Rp	2.101.201,46
		2019	Rp	2.778.925,00
		2020	Rp	2.797.918,00
		2021	Rp	2.778.925,00

		2022	Rp	2.385.057,00
25	Sulawesi Utara	2018	Rp	4.221.161,47
		2019	Rp	4.640.155,00
		2020	Rp	4.372.348,00
		2021	Rp	4.640.155,00
		2022	Rp	4.167.776,00
26	Sulawesi Tengah	2018	Rp	4.238.213,46
		2019	Rp	4.623.258,00
		2020	Rp	4.567.747,00
		2021	Rp	4.623.258,00
		2022	Rp	4.362.165,00
27	Sulawesi Selatan	2018	Rp	10.108.889,12
		2019	Rp	10.374.681,00
		2020	Rp	9.631.040,00
		2021	Rp	10.374.681,00
		2022	Rp	12.548.451,00
28	Sulawesi Tenggara	2018	Rp	4.218.276,44
		2019	Rp	4.576.359,00
		2020	Rp	4.672.660,00
		2021	Rp	4.576.359,00
		2022	Rp	5.260.192,00
29	Gorontalo	2018	Rp	1.233.778,57
		2019	Rp	1.948.827,00
		2020	Rp	2.002.198,00
		2021	Rp	1.948.827,00
		2022	Rp	1.922.519,00
30	Sulawesi Barat	2018	Rp	2.313.814,21
		2019	Rp	2.140.482,00
		2020	Rp	2.164.144,00
		2021	Rp	2.140.482,00
		2022	Rp	2.108.767,00
31	Maluku	2018	Rp	3.326.167,04
		2019	Rp	3.384.152,00
		2020	Rp	3.137.388,00
		2021	Rp	3.384.152,00
		2022	Rp	4.021.218,00
32	Maluku Utara	2018	Rp	2.510.032,64
		2019	Rp	2.750.139,00
		2020	Rp	2.808.345,00
		2021	Rp	2.750.139,00
		2022	Rp	3.379.037,00

33	Papua Barat	2018	Rp	10.640.226,55
		2019	Rp	11.572.152,00
		2020	Rp	12.420.607,00
		2021	Rp	11.572.152,00
		2022	Rp	7.744.110,00
34	Papua	2018	Rp	20.800.268,20
		2019	Rp	15.527.559,00
		2020	Rp	17.248.619,00
		2021	Rp	15.527.559,00
		2022	Rp	15.878.964,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan variasi dalam total APBD mereka selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, provinsi Aceh mengalami kenaikan APBD dari Rp16.000.670,71 juta pada tahun 2018 menjadi Rp18.709.340,00 juta pada tahun 2020, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi Rp16.752.054,00 juta pada tahun 2022. Sementara itu, Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang signifikan dari Rp27.000.089,11 juta pada tahun 2018 menjadi hanya Rp13.252.957,00 juta pada tahun 2019, sebelum sedikit naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang berbeda di setiap provinsi yang dapat memengaruhi alokasi dana APBD dan menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya

mempunyai distribusi normal atau tidak.³⁷ Berikut hasil uji normalitas penelitian ini.

Tabel 4.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		170	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.39539250	
Most Extreme Differences	Absolute	.098	
	Positive	.080	
	Negative	-.098	
Test Statistic		.098	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.546	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.534
		Upper Bound	.559

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 atau lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang dianalisis berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan guna memahami suatu model regresi linier ada hubungan yang kuat baik positif ataupun negative antara data yang ada pada variabel penelitian. Berikut hasil uji autokorelasi penelitian ini.

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.171 ^a	.029	.018	.86941	1.730

a. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

b. Dependent Variable: Inflasi

³⁷M. Sidik Priadana, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021), 45

Berdasarkan tabel tersebut, nilai DW sebesar 1,730 sehingga lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1,5674 dan kurang dari (4-dU) atau $4 - 1,730 = 2,270$ sehingga dapat disimpulkan. Sehingga berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan dalam Durbin Watson maka tidak ada gejala autokorelasi dalam uji tersebut.

c. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, itu disebut kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Lakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat uji glesjer.³⁸ Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini,

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.297	.117		2.544	.012
	Pajak	6.961E-7	.000	.227	2.998	.103
	APBN	-6.180E-12	.000	-.013	-.174	.862

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen yaitu APBN dan Pajak memiliki *p-value* yaitu 0,103 dan 0,862 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Ini berarti tidak ada adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

³⁸ M. Sidik Priadana, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021), 46

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen, karena akan menurunkan kepercayaan terhadap uji signifikansi. Deteksi ada tidaknya gejala polikolonial pada model regresi ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).³⁹ Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini,

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.445	.166			14.701	.000		
	Pajak	7.046E-7	.000	.163		2.130	.035	.994	1.006
	APBN	2.629E-11	.000	.040		.518	.605	.994	1.006

a. Dependent Variable: Inflasi

Pada tabel tersebut, terdapat nilai Tolerance setiap variabel berada pada batas lebih besar dari 0,001 dan nilai VIF untuk setiap variabel berada batas di bawah 10 yang menunjukkan bahwa tidak ada tingkat multikolinearitas yang signifikan antara variabel prediktor dalam model regresi yang diuji

3. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah model linier regresi yang dipakai guna menganalisis pengaruh dari sebagian variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bermanfaat guna memperkirakan nilai variabel dependen jika nilai dari variabel independen bertambah atau berkurang serta

³⁹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan Spss 16.0*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019), 79

memutuskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah setiap variabel independen berhubungan secara pasti atau berlawanan.

⁴⁰ Berikut hasil uji analisis regresi berganda penelitian ini,

Tabel 4.8 Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.445	.166		14.701	.000
	Pajak	7.046E-7	.000	.163	2.130	.035
	APBN	2.629E-11	.000	.040	.518	.605

a. Dependent Variable: Inflasi

Berdasarkan hasil koefisien regresi dalam tabel, persamaan analisis regresi berganda untuk model ini menjadi: 3.358

$$Y = 2,445 + 7,046X_1 + 2,629X_2 + \varepsilon$$

Berikut interpretasi persamaan tersebut:

- 1) Nilai konstanta adalah 2,445 yang menunjukkan nilai variabel inflasi ketika semua variabel independen adalah nol.
- 2) Nilai koefisien regresi pajak adalah 7,046, yang menunjukkan bahwa setiap unit peningkatan dalam variabel pajak berkorelasi positif dengan peningkatan sebesar 7,046 pada variabel inflasi, jika variabel independen lainnya tetap konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi APBN adalah 2,629 yang menunjukkan bahwa setiap unit peningkatan dalam variabel APBN berkorelasi positif dengan peningkatan sebesar 0,292 pada variabel inflasi, jika variabel independen lainnya tetap konstan.

⁴⁰ M. Sidik Priadana, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021), 50

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada $df 1 = n - k - 1$ atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.⁴¹ Berikut hasil uji t pada penelitian ini,

Tabel 4.9 Uji t (Parsial)

		Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.445	.166		14.701	.000
	Pajak	7.046E-7	.000	.163	2.130	.035
	APBN	2.629E-11	.000	.040	.518	.605

a. Dependent Variable: Inflasi

Kemudian secara uji parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak sebesar 2,130 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel pajak lebih besar dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau $2,130 > 1,974$ dan nilai *p-value* atau *sig.* variabel pajak sebesar 0,035 atau kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Berdasarkan tabel uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,605 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini

⁴¹ M. Sidik Priadana, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021), 51

sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,605 < 1,974$ dan nilai p -value atau sig. variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Berikut hasil uji t pada penelitian ini,

Tabel 4.10 Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.790	2	1.895	2.507	.085 ^b
	Residual	126.231	167	.756		
	Total	130.021	169			

a. Dependent Variable: Inflasi

b. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

Berdasarkan tabel uji F tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,507 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 3,05 maka nilai F_{hitung} model tersebut lebih besar dari nilai F_{tabel} yang digunakan atau $2,507 < 3,05$ kemudian nilai p -value atau sig. sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05 ($0,085 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak dan APBN tidak berpengaruh secara simultan terhadap inflasi di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X . Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁴² Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini,

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.171 ^a	.029	.018	.86941

a. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai *R Square* (R^2) adalah 0,029 atau 2,9%, yang berarti variasi dalam variabel dependen yaitu inflasi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu APBN dan pajak yang ada dalam model.

⁴² M. Sidik Priadana, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021), 55

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Terhadap Inflasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai thitung variabel pajak sebesar 2,130 dan apabila nilai ttabel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai thitung variabel pajak lebih besar dari nilai ttabel yang digunakan atau $2,130 > 1,974$ dan nilai p-value atau sig. variabel pajak sebesar 0,035 atau lebih besar dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ndari Surjaningsih G. A. Diah Utari Budi Trisnanto "*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi*"(2019).⁴³ Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ndari Surjaningsih G.A. Diah Utari Budi Trisnanto yaitu hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa *shock* kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara *shock* kenaikan pajak berdampak negatif.

Kenaikan pendapatan pajak daerah ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional dan upaya pemerintah daerah dalam

⁴³ Surjaningsih, Ndari; Utari, G. A. Diah; and Trisnanto, Budi "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 14: No. 4, Article 7.

mengoptimalkan sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.⁴⁴

Variabel pajak yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi di Indonesia mengindikasikan bahwa kenaikan tingkat pajak dapat meningkatkan inflasi dalam teori ekonomi, dalam praktiknya pengaruhnya belum tentu signifikan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti permintaan dan penawaran agregat, kebijakan moneter, serta faktor eksternal seperti harga minyak dunia. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah mengatur pajak dengan hati-hati, memperhatikan dampaknya terhadap kebijakan moneter, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Dengan demikian, variabel pajak berkontribusi pada inflasi, namun dampaknya belum tentu signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia.

2. Pengaruh APBN Terhadap Inflasi di Indonesia.

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,605 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,605 < 1,974$ dan nilai $p-value$ atau sig. variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia.

Ketidak berpengaruh variabel APBN terhadap inflasi di Indonesia selama periode 2018-2022 disebabkan oleh APBN mencakup berbagai

⁴⁴ Berto Muharman “*Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi Di Indonesia.*” Universitas Brawijaya Vo. 1 No 2 Tahun 2020

komponen seperti pendapatan dan pengeluaran pemerintah, yang memiliki dampak yang kompleks terhadap inflasi. Kemudian implementasi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran yang cermat dapat mengurangi potensi dampak negatif APBN pada inflasi. Selanjutnya faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia atau perubahan dalam kondisi ekonomi global dapat mendominasi perubahan tingkat inflasi di Indonesia. Kebijakan moneter dan faktor-faktor makro ekonomi lainnya juga berkontribusi pada inflasi, dan interaksi antara berbagai variabel ini bisa sangat kompleks. Oleh karena itu, meskipun variabel APBN tidak terlihat berpengaruh secara langsung pada inflasi dalam data periode tersebut, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami hubungan ini dengan benar, mengingat beragam faktor yang memengaruhi dinamika inflasi.

Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setiap organisasi atau lembaga tersebut untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Renstra organisasi atau kelembagaan tersebut. Renstra inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang nantinya akan dicapai.⁴⁵

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat inflasi di setiap provinsi beragam, termasuk kebijakan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan dalam permintaan dan penawaran. Ini menunjukkan pentingnya

⁴⁵ Abdul Kadir Arno, Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, September 2016

pemantauan dan manajemen inflasi yang cermat di tingkat daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁶

Cara membiayai defisit anggaran yang tinggi salah satunya dengan melakukan pencetakan uang (*printing money*), namun pencetakan uang (*printing money*), pada tingkat yang melebihi permintaan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar ditangan masyarakat, dan hal ini dapat juga menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga pencetakan uang (*printing money*) tidak diperbolehkan dalam membiayai defisit anggaran. Dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskal akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biaya pinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut, efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara merespon akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup semua sumber pendapatan negara, seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan dana lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi.⁴⁷

Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya,

⁴⁶ Nella Damayanti Hutauruk “*Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia*”. Skripsi Program Strata I Universitas Negeri Jkarta tahun 2019. *Pandemi Covid-19*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.

⁴⁷ Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.

pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh Pajak Terhadap Inflasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak sebesar 2,130 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel pajak lebih besar dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau $2,130 > 1,974$ dan nilai p -value atau sig. variabel pajak sebesar 0,035 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

2. Pengaruh APBN Terhadap Inflasi di Indonesia.

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,605 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,605 < 1,974$ dan nilai p -value atau sig. variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

2. Bagi masyarakat untuk menyiapkan dana darurat dan mencari penghasilan tambahan ketika terjadi inflasi.
3. Masyarakat untuk mengatur pengeluaran dan menabung sebagai bentuk antisipasi terjadinya inflasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 21
- Abdul Halim, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali (Jakarta, 2004), 15
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, hal.9 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Arifah, L. F. (2020). Dunia dan Variabel Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 1996-2018. *Jurnal9 Ilmu Ekonomi*, 10(1), 23-44.
- Assa, R., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode : 2006.1 – 2019-2. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 23-33.
- Badan Pusat Statistik
- Badudu, Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet.ke-1 hal. 978
- Baldacci, E., 2009, Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclicity of Fiskal Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231.
- Berto Muharman “Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi Di Indonesia.” Universitas Brawijaya Vo. 1 No 2 Tahun 2020
- Boediarso Teguh Widodo. 1996. Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Sektor Moneter Dan Neraca Pembayaran. *Jurnal Keuangan Dan Moneter* Vol. 3 No. 3 Hal: 2.
- Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (2005, hal. 107) Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta
- Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta
- Edgmand, Michael R. 1987. Makro ekonomi. Teori dan Kebijakan. New Jersey. Prentice-hall. Binarupa Aksara. Jakarta
- Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, (Yogya, PT Tiara Wacana Yogya: 2003) hal. 64
- Hemming, R., M. Kell & S. Mahfouz, 2002, “The Efecctiveness of fisical Policy in Stimulating Economic Activity- Review of he Literature”, IMF Working Paper, WP/02/208

Heriberta. 1997. Inflasi dan Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah, Suatu Analisis dan Aplikasi di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Pembangunan, edisi 7. FE Unja.

Insukindro, 1995. Ekonomi Uang dan Bank. Teori dan Pengalaman di Indonesia. BPFE, UGM. Yogyakarta

Jaka Sriyana. 2005. Ketahanan Fiskal : Studi Kasus Malaysia dan Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10. No. 2, hal: 123-132. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Judson, Ruth & Athanasios Orphanides, 1999, \approx Inflation, Volatility and Growth Δ , International Finance, Vol. 2 No.1.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018). 48-49

Kunarjo. 2001. Defisit Anggaran Negara. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 2

Monetary-Fiscal Interaction in Indonesia, Asian Office Research Paper, Bank for International Settlement. Judson, Ruth & Athanasios Orphanides, 1999

N. Gregory Mankiw, 2007. Makroekonomi. Edisi keenam. Erlangga. Jakarta

Nella Damayanti Hutauruk "Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia". Skripsi Program Strata I Universitas Negeri Jakarta tahun 2019.

Noripin, Ekonomi Moneter, Buku II (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet. 1

Nuruddin Mhdd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 39

Nurul Huda, et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hal.154-156

Putri Redaktur."Inflasi YoY Pada Desember 2022 Sebesar 5,51 Persen". Info Publik Portal Berita info publik. Januari (2023). <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/699316/inflasi-yoy-pada-desember-2022-sebesar-5-51-persen#>

pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2004

- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis. 1991. Pengantar Makroekonomi. Edisi kedelapan. Erlangga. Jakarta
- Rozalinda, Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi), (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015), Ed. 1, Cet. 2, hal. 137
- Sadono Sukirno. 2004. Makro Ekonomi. Teori pengantar. Edisi ketiga. Jakarta. Raja Grafindo.
- Sasono, H. (2020). Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Indeks Harga Saham Gabungan dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-4. Hal. 1-9.
- Setyowati, Endang et al. 2013. Ekonomi Makro Pengantar. Edisi . BP STIE YKPN Yogyakarta
- Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia Catatan Riset No.11/15/DKM/BRE/CR. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta, Kencana : 2006) hal, 25-28
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sony Yuwono dkk, Penganggaran Sektor Publik (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), 108
- Tubagus Chairil Amachi Zandjani, Perpajakan (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), hal. 1
- Waluyo, Perpajakan, (Jakarta, Salemba Empat : 2011) hal, 02
- Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

Lampiran 1 Hasil Uji Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		170	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.39539250	
Most Extreme Differences	Absolute	.098	
	Positive	.080	
	Negative	-.098	
Test Statistic		.098	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.546	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.534
		Upper Bound	.559

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.297	.117		2.544	.012
	Pajak	6.961E-7	.000	.227	2.998	.103
	APBN	-6.180E-12	.000	-.013	-.174	.862

a. Dependent Variable: Abs_RES

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.171 ^a	.029	.018	.86941	1.730

a. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

b. Dependent Variable: Inflasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	2.445	.166		14.701	.000
	Pajak	7.046E-7	.000	.163	2.130	.035
	APBN	2.629E-11	.000	.040	.518	.605

a. Dependent Variable: Inflasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.790	2	1.895	2.507	.085 ^b
	Residual	126.231	167	.756		
	Total	130.021	169			

a. Dependent Variable: Inflasi

b. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.171 ^a	.029	.018	.86941

a. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

Lampiran 2: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Tarisa Ramadhani, lahir di Parepare pada tanggal 26 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Kadirman dan ibu yang bernama Irmawati. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Juanda, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 28 Mancani Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus SMA pada tahun 2019, penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.